



**RENCANA STRATEGI  
(RENSTRA)  
BAPENDA KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2016 – 2021**



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang  
Telp. 0284 – 321244



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

**BADAN PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH**

KEPUTUSAN BADAN PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 050/ 24 /TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

BADAN PENGELOAAN PENDAPATAN KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-

2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Tahun 2021 - 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

BAB. III PERMASAAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan  
Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat  
Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam  
Negeri dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian  
Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah  
Perangkat Daerah

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAA

BAB VII PENUTUP

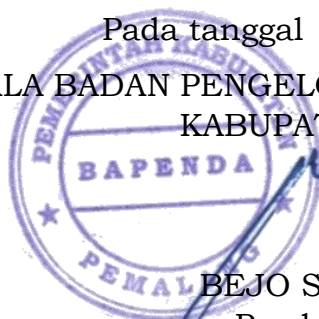
KEDUA : Isi, uraian dan perincian Rencana Strategis Badan  
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang  
Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU Keputusan Badan Pengelolaan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum  
pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini  
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang,

Pada tanggal : 10 Juni 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BEJO SUWARNO, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19611125 198607 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang telah menyusun Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016 – 2021 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 25 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam mensukseskan pembangunan dalam bidang pengelolaan keuangan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Renstra ini dapat tersusun dengan baik.

Pematang, 10 Juni 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PEMATANG



BEJO SUWARNO, S.IP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611125 198607 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT KEPUTUSAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	34
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	38
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	45
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	45
4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah .....	49
BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	57
BAB.VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH .....	71
BAB VII PENUTUP .....	73
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel : II.1	Jumlah Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Golongan dan Pendidikan .....	14
Tabel : II.2	Jumlah Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Golongan Per Januari 2021 .....	15
Tabel : II.3	Distribusi Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Januari 2021 .....	15
Tabel : II.4	Pegawai Bapenda Berdasarkan Diklat Struktural Per Januari 2021 .....	15
Tabel : II.5	Sarana dan Prasarana (Inventaris) Bapenda	16
Tabel : II.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda .....	18
Tabel : II.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda .....	19
Tabel : II.8	Komperasi Capaian Sasaran Renstra PD Terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi .....	27
Tabel : III.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
Tabel : III.2	Pemetaan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal .....	32
Tabel : III.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	35
Tabel : III.4	Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L.....	38
Tabel : III.5	Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi.....	40
Tabel : III.6	Permasalahan Pelayanan PD berdasar-kan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	42
Tabel : III.7	Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisi KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	43
Tabel : IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	46
Tabel : IV.2	Sasaran dan Idikator Kinerja Utama .....	47
Tabel : IV.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Bapenda .....	48
Tabel : IV.4	Program dan Indikator Bapenda .....	51
Tabel : IV.5	Program, Kegiatan dan indikator Bapenda .....	51



Tabel : V.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bapenda Kabupaten Pematang ..... 61
Tabel : VI.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 72

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 .....	2
Gambar I.2 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD (Lampiran IV Permendagri No. 54 Tahun 2010) .....	3
Gambar II.1 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pematang Jaya (Perda No. 70 Tahun 2016) .....	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang RPJMD. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Bahwa Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan yang berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021 dilatarbelakangi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021, maka Bapenda Kabupaten Pematang Jaya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pematang Jaya terpilih. Penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Pematang Jaya berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra K/ L dan Renstra Provinsiserta Renja Perangkat Daerah.

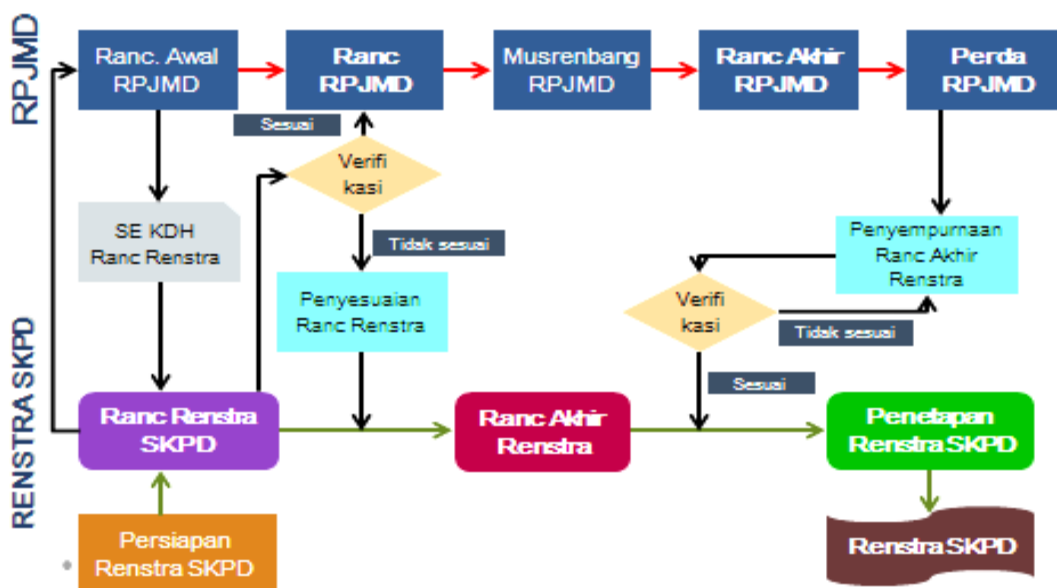
Renstra Bapenda merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun kedepan, di dalamnya memuat tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan peran dan fungsi Bapenda Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah dibidang pendapatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Proses penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana Gambar di bawah :

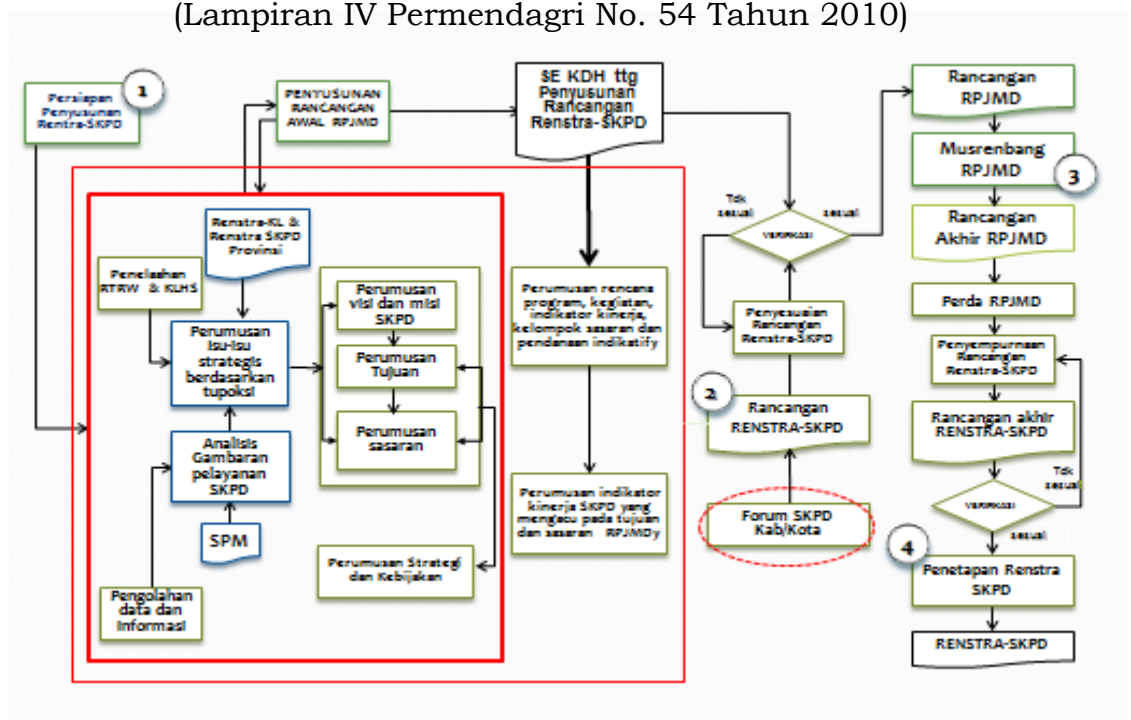
Gambar I.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010



Gambar I.2

Bagan Alir Tahapan dan Tata cara Penyusunan Renstra PD  
(Lampiran IV Permendagri No. 54 Tahun 2010)



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang ;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2016-2021.

#### 2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, adalah untuk :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Bapenda Kabupaten Pemalang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menterjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Pemalang dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPENDA KABUPATEN PEMALANG**

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Bapenda Kabupaten Pemalang terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun kedepan.

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/ L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Pemalang.

**BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan Bapenda Kabupaten Pemalang selama lima tahun kedepan.

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam pencapaian tujuan, sasaran Bapenda Kabupaten Pemalang selama lima tahun kedepan.

**BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bapenda Kabupaten Pemalang ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan .

**BAB VII PENUTUP**

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi fungsi dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPENDA KABUPATEN PEMALANG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bapenda**

##### **2.1.1. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah.

##### **2.1.2. Fungsi**

Selain tugas tersebut Bapenda mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Bapenda terdiri dari Kepala Bapenda yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Perencanaan Pendapatan, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Keberatan serta Kelompok Jabatan Fungsional,

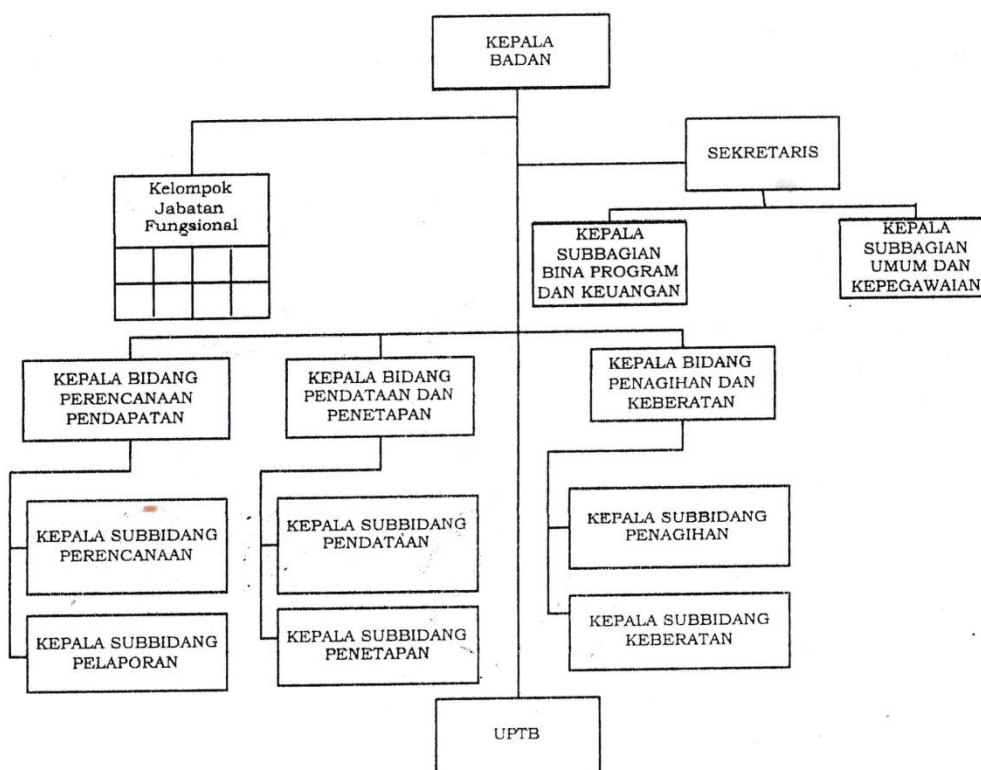
Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan Pendapatan, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Perencanaan
  - b. Sub Bidang Pelaporan.
4. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pendataan
  - b. Sub Bidang Penetapan.
5. Bidang Penagihan & Keberatan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Penagihan
  - b. Sub Bidang Keberatan.

Adapun bagan struktur organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang dapat dilihat sebagaimana pada Gambar II.1 di bawah.

Gambar II.1.

Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang



Sebagaimana Gambar II.1 diatas, masing-masing unsur dari organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70

Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten sebagai berikut:

**A. Kepala Bapenda**

Kepala Bapenda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
3. merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah sesuai program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pendapatan daerah agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan menindaklanjuti permohonan keberatan atas besaran ketetapan pajak oleh wajib pajak sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah sebagai dasar pengenaan pajak daerah;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bapenda dengan instansi atau pihak terkait sesuai dengan program kerja agar target kerja tercapai sesuai rencana;
7. merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan berdasarkan hasil analisis dan atau pemanfaatan teknologi guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan

indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;

10. mengevaluasi pelaksanaan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

#### **B. Sekretaris Bapenda**

Sekretaris Bapenda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan , Renstra dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. menyelenggarakan program dan kegiatan subbagian Bina Program dan keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik dan seluruh bidang/subbidang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutahiran informasi publik;
6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan;
7. menyusun rancangan inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

8. mengkoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. mengkoordinasikan penyusunan laporan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

### C. **Bidang Perencanaan Pendapatan**

Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah[
3. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatansesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjang kegiatan pelayanan public;
4. mengkoordinasikan kegiatan perhitungan potensi pendapatan daerah dengan unit teknis sesuai prosedur dan teknik perhitungan sebagai dasar penentuan target pendapatan daerah masing-masing unit teknis;
5. menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana pendapatan daerah berdasarkan hasil perhitungan potensi sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
6. menyelenggarakan kegiatan sosialisai dan pembinaan kepada wajib pajak tentang peraturan pajak dan retribusi daerah guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
7. menyusun laporan piutang pajak daerah akhir tahun sesuai dengan prosedur perhitungan saldo piutang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. menyusun rancangan inivasi Bidang Perencanaan Pendapatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public;

9. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dret spokok dan fungsi menyusun program kerja an fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

#### **D. Bidang Pendataan dan Penetapan**

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai urusan tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
3. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan public;
4. menyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah guna menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak , Nomor Objek Pajak;
5. memverifikasi konsep nota perhitungan pajak terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk semua jenis pajak sebagai dasar pengenaan besarnya pajak daerah;
6. menyusun rancangan inovasi Bidang Pendataan dan Penetapan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

9. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan secara efektif dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas ; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi menyusun program kerja an fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

**E. Bidang Penagihan dan Keberatan**

Bidang Penagihan dan keberatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan keberatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Penagihan dan keberatan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
3. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan keberatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan public;
4. menyelenggarakan kegiatan pelelangan sewa tanah dana pendidikan /grantungan milik Pemerintah Kabupaten Pematang sesuai jadwal yang telah ditentukan guna peningkatan pendapatan daerah;
5. memverifikasi laporan piutang pajak daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) secara berkala sebagai dasar untuk pelaksanaan penagihan;
6. memverifikasi konsep laporan pengajuan permohonan angsuran retribusi dan keberatan dari wajib pajak dengan meneliti data dukung sebagai dasar pengambilan keputusan;
7. menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak daerah;
8. menyusun rancangan inovasi Bidang Penagihan dan keberatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan keberatan dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan keberatan secara efektif dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas ; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

## 2.2 . Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah KabupatenPemalang pada akhir Januari 2017 didukung oleh 63 personil dengan rincian sebagaimana pada Tabel II.1., Tabel II.2. Tabel II.3. dan Tabel II.4 di bawah ini:

**Tabel :II.1.**  
**Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan& Pendidikan**  
**Per Januari 2017**

GOL	LAKI-LAKI						JML	PEREMPUAN						JML	JMLTOTAL
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
IV/a	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>JMLGOLIV</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>
III/d	-	6	-	-	-	-	6	-	5	-	-	-	-	5	11
III/c	-	3	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	4
III/b	1	5	-	5	-	-	11	-	-	-	2	-	-	2	13
III/a	-	-	-	5	-	-	5	-	1	-	-	-	-	1	6
<b>JMLGOLIII</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	-	<b>10</b>	-	-	<b>25</b>	-	<b>7</b>	-	<b>2</b>	-	-	<b>9</b>	<b>34</b>
II/d	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
II/c	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	2	-	-	2	6
II/b	-	-	-	11	-	-	11	-	-	-	2	-	-	2	13
II/a	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>JMLGOLII</b>	-	-	<b>1</b>	<b>19</b>	-	-	<b>20</b>	-	-	-	<b>4</b>	-	-	<b>4</b>	<b>24</b>
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JMLGOLI</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>JMLTOTAL</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	-	<b>50</b>	-	<b>7</b>	-	<b>6</b>	-	-	<b>13</b>	<b>63</b>



**Tabel : II.2**  
**Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan**  
**Per Januari 2017**

No	Uraian	Golongan				Jml
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	1	4	5	1	11
3.	Bidang Perencanaan Pendapatan		1	7	1	9
4.	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	3	7	1	11
5.	Bidang Penagihan dan Keberatan	-	16	15	-	31
	Jumlah	1	24	34	4	63

**Tabel : II.3**  
**Distribusi Pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Per Januari 2017**

No	Uraian	SLTP	SLTA	Dip	S-1	S-2	Jml
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	1	4	-	5	1	11
3.	Bidang Perencanaan Pendapatan	-	2	-	6	1	9
4.	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	4	-	7	-	11
5.	Bidang Penagihan dan Keberatan	-	25	1	5	-	31
	Jumlah	1	35	1	24	2	63

**Tabel : II.4**  
**Pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang**  
**Berdasarkan Diklat Struktural**  
**Per Januari 2017**

No	Uraian	Jumlah
1.	SPAMEN/ Diklatpim II	-
2.	SPAMA/ Diklatpim III	4
3.	ADUMLA	1
4.	ADUM/ Diklatpim IV	8
	Jumlah	13

### 2.3. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Bapenda Kabupaten Pemalang memiliki sarana dan prasarana yang merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan prasarana (Inventaris) yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagaimana pada Tabel II.5 dibawah :

**Tabel : II.5.**  
**Sarana dan Prasarana (Inventaris) Bapenda**  
**Kabupaten Pemalang**  
**Per Januari 2017**

No	Uraian	Jumlah
1.	Kendaraan roda-4	6 Unit
2.	Kendaraan Roda-2	47 Unit
3.	Mesin ketik manual portable	1 Unit
4.	Mesin ketik	3 Unit
5.	Mesin hitung uang	1 Unit
6.	Mesin foto copy	1 Unit
7.	Almari besi	1 Unit
8.	Almari kayu	6 Unit
9.	Band kas	1 Unit
10.	Filling besi mental	10 Unit
11.	Rak Besi	3 Unit
12.	Kalkulator	1 Unit
13.	Mesin perforator besar	2 Unit
14.	Alat penghancur kertas	2 Unit
15.	Air Conditionare (AC)	13 Unit
16.	Kipas angin	3 Unit
17.	Kursi putar	3 Unit
18.	Meja komputer	3 Unit
19.	Rak Kayu	2 Unit
18.	Dispenser	1 Unit
19.	Televisi	3 Unit
20.	Peralatan pemetaan ukuran lain-lain	1 Unit
21.	Peralatan jaringan lain-lain	1 Unit
22.	Komputer miniframe/ server	2 Unit
23.	Hardisk	1 Unit
24.	Personal komputer lain	1 Unit
25.	PC. Unit	25 Unit
26.	Unintemutable power suply	2 Unit
27.	Unintemutable power non suply	1 Unit

No	Uraian	Jumlah
28.	Router	1 Unit
29.	Komputer Note Book	9 Unit
30.	Laptop	7 Unit
31.	Printer, laser jet, injet,	17 Unit
32.	Scaner	1 Unit
33.	Meja kursi tamu	2 Unit
34.	Meja tamu	1 Unit
35.	Camera digital	1 Unit
36.	Telephone	4 Unit
37.	Faxcimili	1 Unit
38.	Alat Detektor uang palsu	1 Unit
39.	Kursi rapat	1 Unit
40.	Kursi lipat	6 Unit
41.	Kursi besi/mental	1 Unit
42.	Kursi kerja pejabat eselon III	1 Unit
43.	Kursi kayu	4 Unit
44.	Meja biro eselon II	1 Unit
45.	Meja biro eselon III	1 Unit
46.	Meja biro kecil	1 Unit

#### **2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target renstra periode sebelumnya dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah tahun 2011-2016 belum dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang masih dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang . Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, dan melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Adapun jenis pajak yang dikelola terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dan 1 jenis pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi menurut indikator sasaran/target Periode 2011-2016 disajikan dalam Tabel II.6, di bawah :

**Tabel : II.6.****Pencapaian Kinerja Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pematang**

No	Bidang Urusan/ Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi capaian tahun					Rasio capaian pada tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah dan macam pajak daerah	-	-	-	10	10	11	11	11	8	11	12	12	11	0,80	1,10	1,09	1,09	100,00

## Penjelasan :

1. Pada Tahun 2011 terealisasi 80,00 % dari target rencana 10 jenis, realisasi hanya 8 jenis
2. Pada Tahun 2012 terealisasi 110,00 % dari target rencana 10 jenis, realisasi 11 jenis
3. Pada Tahun 2013 terealisasi 109,00 % dari target rencana 11 jenis, realisasi 12 jenis
4. Pada Tahun 2014 terealisasi 109,00 % dari target rencana 11 jenis, realisasi 12 jenis
5. Pada Tahun 2015 terealisasi 100,00 % dari target rencana 11 jenis, realisasi 11 jenis

## 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Pada periode Tahun 2011- 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan masih dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya, secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : II.7.**

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Urusan Wajib</b>																	
<b>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	3.006.577.750	2.862.510.100	4.633.350.200	4.876.246.500	4.879.887.000	2.382.560.769	2.288.010.536	4.070.133.994	4.137.436.562	4.022.566.215	79,24	79,93	87,84	84,85	82,43	4.051.714.310	3.380.141.615
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.500.000	23.345.000	43.250.000	20.600.000	31.500.000	44.861.500	21.015.000	32.480.000	20.040.000	27.257.500	94,45	90,02	75,10	97,28	86,53	33.239.000	29.130.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	167.640.000	187.240.000	318.900.000	367.000.000	89.532.995	108.100.218	169.140.235	293.514.829	334.441.642	85,27	64,48	90,33	92,04	91,13	229.156.000	198.945.984
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	390.000.000	350.000.000	362.000.000	339.500.000	382.300.000	342.892.390	347.249.500	331.026.280	330.657.000	370.016.618	87,92	99,21	91,44	97,40	96,79	364.760.000	344.368.358
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	27.500.000	17.500.000	15.000.000	18.000.000	15.500.000	21.573.500	12.130.550	12.977.425	14.072.125	9.675.625	78,45	69,32	86,52	78,18	62,42	18.700.000	14.085.845
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	130.000.000	139.771.000	125.950.000	92.500.000	99.627.000	129.599.000	115.741.000	102.245.500	88.905.000	94.757.100	99,69	82,81	81,18	96,11	95,11	117.569.600	106.249.520
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.000.000	50.000.000	54.600.000	40.000.000	56.000.000	43.184.800	49.170.000	48.156.650	35.743.800	55.981.150	95,97	98,34	88,20	89,36	99,97	49.120.000	46.447.280
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	36.740.250	20.000.000	42.000.000	30.000.000	15.000.000	35.993.750	14.569.000	34.759.000	22.144.000	14.974.400	97,97	72,85	82,76	73,81	99,83	28.748.050	24.488.030
Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	86.704.000	89.810.000	94.500.000	85.800.000	74.615.000	75.858.000	85.467.500	93.860.000	85.369.500	99,49	87,49	95,16	99,32	99,50	86.362.800	83.034.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	58.125.000	76.500.000	70.000.000	46.500.000	55.272.500	54.880.000	70.325.000	63.069.600	45.995.500	92,12	94,42	91,93	90,10	98,92	62.225.000	57.908.520
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	24.000.000	73.000.000	60.900.000	25.000.000	10.000.000	20.391.500	60.356.100	59.936.700	21.463.900	9.075.200	84,96	82,68	98,42	85,86	90,75	38.580.000	34.244.680

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kantor																	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	-	529.200.000	75.000.000	8.500.000	14.228.000	-	518.833.500	66.592.500	8.497.500	94,85	-	98,04	88,79	99,97	125.540.000	121.630.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	34.493.600	-	-	-	4.771.500	28.972.600	-	-	-	95,43	83,99	-	-	-	7.898.720	6.748.820
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	28.925.000	25.724.400	25.000.000	33.000.000	26.038.000	21.689.600	19.873.000	21.743.400	31.220.200	86,79	74,99	77,25	86,97	94,61	28.529.880	24.112.840
Penyediaan Makanan dan Minuman	140.000.000	135.000.000	127.000.000	141.500.000	153.500.000	135.436.300	122.436.850	118.678.800	139.928.598	147.244.015	96,74	90,69	93,45	98,89	95,92	139.400.000	132.744.913
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.000.000	139.620.000	175.000.000	97.100.000	175.000.000	92.351.866	119.917.150	125.427.300	92.577.540	163.066.393	92,35	85,89	71,67	95,34	93,18	137.344.000	118.668.050
Penyediaan Jasa Keamanan	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	19.200.000	-	-	-	100,00	96,00	8.000.000	7.840.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Kas	41.762.500	-	38.775.500	65.865.000	67.500.000	31.010.000	-	29.160.500	60.729.087	50.682.888	74,25	-	75,20	92,20	75,09	42.780.600	34.316.495
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Belanja Tak Langsung PPKD	103.150.000	111.699.300	106.350.000	136.350.000	122.875.000	93.659.000	97.750.500	82.538.100	124.334.230	102.545.444	90,80	87,51	77,61	91,19	83,46	116.084.860	100.165.455
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan	190.840.000	194.293.000	194.523.800	219.000.000	207.285.000	172.189.500	163.560.000	161.103.150	194.124.800	197.618.400	90,23	84,18	82,82	88,64	95,34	201.188.360	177.719.170
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Dana dan Anggaran Kas	70.085.000	-	70.472.500	70.472.500	90.000.000	59.685.000	-	67.432.500	68.329.000	73.909.450	85,16	-	95,69	96,96	82,12	60.206.000	53.871.190
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Pendapatan	1.370.000.000	1.232.394.200	2.309.054.000	2.919.959.000	2.855.000.000	895.274.668	874.614.468	2.000.572.854	2.323.886.153	2.143.682.690	65,35	70,97	86,64	79,59	75,09	2.137.281.440	1.647.606.167
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	-	-	-	57.000.000	38.000.000	-	-	-	41.721.000	37.355.000	-	-	-	73,19	98,30	19.000.000	15.815.200
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.951.725.000	3.465.455.000	2.832.091.100	3.565.530.000	3.513.171.000	1.796.394.630	3.248.700.257	2.450.086.188	3.177.318.485	3.358.503.721	92,04	93,75	86,51	89,11	95,60	3.065.594.420	2.806.200.656
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	990.000.000	1.570.000.000	1.376.500.000	2.622.630.000	2.063.630.000	890.436.100	1.552.193.750	1.179.899.100	2.298.936.350	2.018.897.800	89,94	98,87	85,72	87,66	97,83	1.724.552.000	1.588.072.620
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	35.000.000	43.000.000	35.803.600	92.000.000	110.400.000	33.069.000	-	35.040.500	83.420.000	110.400.000	94,48	-	97,87	90,67	100,00	63.240.720	52.385.900
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				48.000.000	132.620.000				47.710.000	132.370.000				99,40	99,81	90.310.000	45.020.000
Pengadaan Mebeleur	130.000.000	131.500.000	67.200.000	-	85.000.000	124.492.250	120.871.875	62.586.000	-	70.784.000	95,76	91,92	93,13	-	83,28	82.740.000	75.746.825

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	110.000.000	1.014.745.000	619.787.500	123.000.000	520.500.000	108.808.500	942.850.300	556.719.000	118.775.000	467.381.629	98,92	92,91	89,82	96,57	89,79	477.606.500	438.906.886
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	122.500.000	215.000.000	104.000.000	120.000.000	50.000.000	121.014.500	206.876.000	102.457.000	117.994.500	49.879.500	98,79	-	98,52	98,33	99,76	122.300.000	119.644.300
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	47.500.000	55.000.000	69.000.000	73.000.000	55.000.000	41.400.700	50.828.645	59.289.788	52.839.685	40.401.692	87,16	92,42	85,93	72,38	73,46	59.900.000	48.952.102
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	76.325.000	90.000.000	86.400.000	113.900.000	115.000.000	75.052.800	79.653.587	82.993.250	103.525.350	107.398.500	98,33	88,50	96,06	90,89	93,39	96.325.000	89.724.697
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	20.000.000	17.000.000	20.000.000	10.000.000	-	10.295.000	9.370.000	17.965.000	10.000.000	-	51,48	55,12	89,83	100,00	13.400.000	9.526.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30.000.000	38.425.000	17.500.000	20.000.000	12.000.000	27.733.400	33.216.500	9.362.000	17.350.000	11.964.000	92,44	86,45	53,50	86,75	99,70	23.585.000	19.925.180
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	5.000.000	4.000.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000	4.831.000	3.928.000	2.994.500	5.000.000	9.718.000	96,62	98,20	99,82	100,00	97,18	5.400.000	5.294.300
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya	-	-	-	61.000.000	69.021.000	-	-	-	60.630.000	69.006.000	-	-	-	99,39	99,98	26.004.200	25.927.200
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengelolaan Aset Daerah	155.000.000	165.000.000	231.400.000	152.000.000	150.000.000	131.940.000	161.955.000	225.640.000	151.135.000	147.706.600	85,12	98,15	97,51	99,43	98,47	170.680.000	163.675.320
Pemeliharaan Rutin/Berkala Software dan Sistem Informasi	250.400.000	118.785.000	204.500.000	115.000.000	130.000.000	237.616.380	86.031.600	123.735.050	102.037.600	112.596.000	94,89	72,43	60,51	88,73	86,61	163.737.000	132.403.326
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	350.000.000	471.525.000	366.850.000	210.000.000	37.913.000	236.674.075	436.592.876	207.043.200	122.226.485	19.944.752	67,62	92,59	56,44	58,20	52,61	287.257.600	204.496.278
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	350.000.000	471.525.000	366.850.000	210.000.000	37.913.000	236.674.075	436.592.876	207.043.200	122.226.485	19.944.752	67,62	92,59	56,44	58,20	52,61	287.257.600	204.496.278
<b>Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	379.835.000	310.920.000	307.850.000	322.500.000	409.500.000	350.305.050	272.561.500	275.363.457	291.380.300	375.572.654	92,23	87,66	89,45	90,35	91,71	346.121.000	313.036.592
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Tapkin)	20.000.000	22.050.000	21.800.000	16.000.000	17.000.000	19.369.550	20.380.750	17.610.500	15.703.200	16.991.100	96,85	92,43	80,78	98,15	99,95	19.370.000	18.011.020
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	25.000.000	25.000.000	13.550.000	15.000.000	14.500.000	24.381.250	23.130.000	13.423.900	14.112.500	13.696.000	97,53	92,52	99,07	94,08	94,46	18.610.000	17.748.730
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	20.000.000	23.420.000	23.000.000	20.000.000	33.000.000	18.173.400	22.995.000	18.637.500	19.961.000	32.950.700	90,87	98,19	81,03	99,81	99,85	23.884.000	22.543.520



Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasian	66.325.000	80.950.000	80.000.000	87.500.000	85.000.000	64.217.500	62.718.100	68.838.357	76.000.900	76.943.842	96,82	77,48	86,05	86,86	90,52	79.955.000	69.743.740
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasian	142.010.000	59.500.000	81.500.000	87.500.000	165.000.000	122.935.350	54.398.550	77.268.200	83.452.700	146.169.312	86,57	91,43	94,81	95,37	88,59	107.102.000	96.844.822
Penyusunan Rekonsiliasi Data Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	106.500.000	100.000.000	88.000.000	96.500.000	95.000.000	101.228.000	88.939.100	79.585.000	82.150.000	88.821.700	95,05	88,94	90,44	85,13	93,50	97.200.000	88.144.760
<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	50.000.000	36.270.000	34.600.000	37.000.000	52.000.000	49.392.500	35.285.700	26.528.000	36.979.350	51.159.000	98,79	97,29	76,67	99,94	98,38	41.974.000	39.868.910
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	50.000.000	36.270.000	34.600.000	37.000.000	52.000.000	49.392.500	35.285.700	26.528.000	36.979.350	51.159.000	98,79	97,29	76,67	99,94	98,38	41.974.000	39.868.910
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	3.875.238.000	2.744.229.800	3.359.225.014	4.173.273.500	3.736.400.000	3.226.001.729	2.380.904.334	2.796.383.736	3.340.937.168	3.171.745.338	83,25	86,76	83,24	80,06	84,89	3.577.673.263	2.983.194.461
Penyusunan Analisis Standar Belanja	150.000.000	110.000.000	134.800.000	125.500.000	125.000.000	132.431.400	101.444.925	114.738.550	97.344.650	109.700.700	88,29	92,22	85,12	77,57	87,76	129.060.000	111.132.045
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah	-	-	-	36.500.000	50.000.000	-	-	-	35.019.625	23.119.400	-	-	-	95,94	46,24	17.300.000	11.627.805
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	87.000.000	75.000.000	81.000.000	75.600.000	75.000.000	86.761.875	74.405.100	79.620.250	75.105.400	74.758.700	99,73	99,21	98,30	99,35	99,68	78.720.000	78.130.265
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi	222.000.000	-	-	-	-	101.248.000	-	-	-	-	45,61	-	-	-	-	44.400.000	20.249.600
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	250.000.000	210.943.000	220.943.000	275.500.000	240.000.000	225.735.925	198.249.985	211.493.362	255.704.835	235.508.282	90,29	93,98	95,72	92,81	98,13	239.477.200	225.338.478
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	50.000.000	45.000.000	55.000.000	46.500.000	45.000.000	38.067.950	39.265.400	47.700.500	41.637.000	41.826.800	76,14	87,26	86,73	89,54	92,95	48.300.000	41.699.530
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	250.000.000	240.940.000	255.000.000	300.000.000	280.000.000	239.248.400	226.273.600	222.446.050	285.395.815	273.621.450	95,70	93,91	87,23	95,13	97,72	265.188.000	249.397.063
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	50.000.000	45.000.000	50.940.000	46.500.000	45.000.000	43.887.470	39.649.175	46.269.300	40.658.460	44.305.600	87,77	88,11	90,83	87,44	98,46	47.488.000	42.954.001
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	266.075.000	243.000.000	246.500.000	250.000.000	235.000.000	249.094.325	218.449.300	241.694.200	232.090.156	228.351.189	93,62	89,90	98,05	92,84	97,17	248.115.000	233.935.834

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana APBD	102.565.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	25.000.000	90.514.250	25.134.700	27.303.250	27.748.350	23.756.932	88,25	73,93	80,30	81,61	95,03	45.913.000	38.891.496
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	450.000.000	-	-	-	-	447.937.000	-	-	-	-	99,54	-	-	-	-	90.000.000	89.587.400
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	352.000.000	130.000.000	245.000.000	328.000.000	313.100.000	312.501.045	116.052.300	226.986.800	269.147.150	278.913.360	88,78	89,27	92,65	82,06	89,08	273.620.000	240.720.131
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	-	400.000.000	423.801.000	364.341.000	503.000.000	-	385.775.405	354.673.070	327.522.650	409.307.210	-	96,44	83,69	89,89	81,37	338.228.400	295.455.667
Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	347.575.000	253.361.800	272.402.514	319.500.000	296.000.000	338.828.000	252.425.300	262.672.900	312.898.350	287.928.900	97,48	99,63	96,43	97,93	97,27	297.767.863	290.950.690
Peningkatan Manajemen Pembayaran PBB Aset/ Barang Daerah	38.000.000	38.000.000	43.000.000	36.000.000	28.000.000	28.561.689	34.319.784	24.831.500	29.231.754	19.664.124	75,16	90,32	57,75	81,20	70,23	36.600.000	27.321.770
Peningkatan Manajemen Sarana dan Prasarana Aset/ Barang Daerah	90.050.000	-	17.100.000	16.000.000	22.000.000	85.015.425	-	3.127.000	13.890.000	15.549.500	94,41	-	18,29	86,81	70,68	29.030.000	23.516.385
Peningkatan Manajemen Tertib Administrasi Pengelolaan Aset/ Barang Daerah	310.000.000	160.000.000	164.400.000	169.500.000	145.000.000	223.843.750	78.981.825	66.721.600	123.128.350	74.864.832	72,21	49,36	40,58	72,64	51,63	189.780.000	113.508.071
Peningkatan Manajemen Pelaporan Semesteran Aset/ Barang Daerah	250.000.000	150.000.000	403.876.000	858.000.000	572.500.000	156.766.500	84.792.875	345.107.800	534.197.283	465.672.908	62,71	56,53	85,45	62,26	81,34	446.875.200	317.307.473
Peningkatan Manajemen Penghapusan dan Pemantauan Aset/ Barang Daerah	110.000.000	70.000.000	93.600.000	175.000.000	145.800.000	54.947.075	63.731.450	64.458.250	99.276.750	96.531.500	49,95	91,04	68,87	56,73	66,21	118.880.000	75.789.005
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito	93.798.000	98.385.000	100.862.500	97.832.500	96.000.000	84.705.500	80.165.500	64.367.000	95.738.000	85.820.450	90,31	81,48	63,82	97,86	89,40	97.375.600	82.159.290
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pengelolaan Dana Perimbangan	60.000.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000	25.000.000	53.532.000	18.539.910	29.274.554	12.212.000	8.586.651	89,22	30,90	58,55	24,42	34,35	49.000.000	24.429.023
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Tanah Dana Pendidikan	-	145.600.000	195.000.000	242.000.000	230.000.000	-	136.752.800	177.614.500	191.349.650	191.725.250	-	93,92	91,08	79,07	83,36	162.520.000	139.488.440

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	346.175.000	-	-	-	-	232.374.150	-	-	-	-	67,13	-	-	-	-	69.235.000	46.474.830
Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	-	-	-	17.500.000	25.000.000	-	-	-	17.103.000	15.500.000	-	-	-	97,73	62,00	8.500.000	6.520.600
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Pengelolaan Eks Bando Desa yang daerahnya berubah menjadi Kelurahan	-	135.000.000	212.000.000	198.000.000	110.000.000	-	116.371.500	151.142.000	133.225.900	89.750.000	-	86,20	71,29	67,29	81,59	131.000.000	98.097.880
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	-	50.000.000	60.000.000	111.500.000	105.000.000	-	41.493.500	34.141.300	91.312.040	76.981.600	-	82,99	56,90	81,89	73,32	65.300.000	48.785.688
Peningkatan efektivitas pengelola keuangan daerah	-	50.000.000	-	-	-	-	48.630.000	-	-	-	-	97,26	-	-	-	10.000.000	9.726.000
<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	256.248.000	326.750.000	351.500.000	383.500.000	372.000.000	255.484.350	316.466.200	340.228.950	366.498.700	363.634.308	99,70	96,85	96,79	95,57	97,75	337.999.600	328.462.502
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	146.248.000	168.000.000	179.000.000	191.500.000	192.000.000	146.038.000	166.333.600	174.376.300	186.163.250	190.982.364	99,86	99,01	97,42	97,21	99,47	175.349.600	172.778.703
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa/ Kelurahan	110.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.000	80.000.000	109.446.350	85.058.100	86.157.100	85.354.450	79.318.644	99,50	97,77	99,03	98,11	99,15	90.200.000	89.066.929
Klarifikasi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	-	71.750.000	85.500.000	105.000.000	100.000.000	-	65.074.500	79.695.550	94.981.000	93.333.300	-	90,70	93,21	90,46	93,33	72.450.000	66.616.870
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	175.060.000	23.541.900	146.293.686	179.500.000	132.715.000	166.539.450	8.726.900	137.097.950	156.869.050	121.332.100	95,13	37,07	93,71	87,39	91,42	131.422.117	118.113.090
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	145.000.000	-	120.042.000	136.500.000	100.000.000	144.714.450	-	117.925.700	134.307.550	97.699.600	99,80	-	98,24	98,39	97,70	100.308.400	98.929.460
Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	30.060.000	23.541.900	26.251.686	43.000.000	32.715.000	21.825.000	8.726.900	19.172.250	22.561.500	23.632.500	72,60	37,07	73,03	52,47	72,24	31.113.717	19.183.630
<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	135.000.000	90.000.000	70.000.000	70.000.000	125.000.000	38.491.100	46.147.884	41.842.150	44.736.769	20.896.088	28,51	51,28	59,77	63,91	16,72	98.000.000	38.422.798

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi/ Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar daerah pada Bidang Ekonomi	135.000.000	90.000.000	70.000.000	70.000.000	125.000.000	38.491.100	46.147.884	41.842.150	44.736.769	20.896.088	28,51	51,28	59,77	63,91	16,72	98.000.000	38.422.798
<b>Jumlah keseluruhan --&gt;</b>	10.179.683.750	10.331.201.800	12.101.760.000	13.817.550.000	13.258.586.000	8.501.843.653	9.033.396.187	10.344.707.625	11.674.382.869	11.505.354.176	83,52	87,44	85,48	84,49	86,78	11.937.756.310	10.211.936.902

## **2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

Dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan yaitu menuju Kabupaten Pemalang hebat yang berdaulat, berjati diri, mandiri dan sejahtera, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang masih menemukan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan tugas dan fungsi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

Menunjuk pada visi dan misi Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 tantangan pelayanan Kabupaten Pemalang antara lain :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum sertakemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Adapun tantangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah yang dihadapi antara lain :

1. Kurang optimalnya sistem pengawasan pengelolaan pendapatan dari sektor pajak daerah
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah.
3. Tingginya tuntutan peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Pemalang yaitu : Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera.
4. Validasi potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah melalui identifikasi, analisis, kajian ilmiah, dan monitoring evaluasi.

5. Profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah berbasis teknologi informasi.
6. Tuntutan keterbukaan informasi public menuju good government.

Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain :

1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan.
2. Ketersediaan potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.
4. Tarif pungutan dalam pengelolaan pajak daerah dapat disesuaikan dengan masyarakat di daerah.

Komperasi capaian sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L disajikan dalam Tabel II.8 dibawah ini.

**Tabel : II.8.**

**Komperasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PD Kabupaten	Sasaran Pada Renstra PD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1	Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi/Target	Peningkatan PAD	Meningkatnya PAD dari unsur pajak daerah	-
2	Peningkatan /pertumbuhan PAD	Peningkatan PAD	Intensifikasi pemungutan PAD	-

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

##### 3.1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah. Sedangkan fungsi **Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang**, antara lain :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, perlu dilakukan identifikasi masalah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan riang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang antara lain :

1. Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan perlu dilakukan review seiring dengan perkembangan kelembagaan serta terbitnya produk hukum tingkat atasnya. Selain itu belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;

2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena institusi Badan Daerah dan baru terbentuk pada awal tahun 2017, dimana didalamnya banyak pegawai yang baru masuk, sehingga belum menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai tentang regulasi tersebut;
3. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajakdaerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum pahamakan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
5. Belum validnya data wajib pajak, karena masih memakai data dari KPP Pratama pelimpahan PBB-P2 tahun 2013;
6. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
7. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pendapatan daerah;
8. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
9. Terbatasnya anggaran yang tersedia;
10. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah;

Identifikasi permasalahan Bapenda Kabupaten berdasarkan tugas dan fungsinya disajikan dalam Tabel III.1 dibawah:

**Tabel: III.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD**

Aspek Kajian	Capaian / kondisi saat ini	Standar yg digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal Kewenangan PD	Eksternal Diluar Kewenangan PD	
Gambaran pelayanan PD	11 pajak	Perda No.5 Tahun 2010 tentang Bea	Kapasitas untuk melakukan pendataan	-	Belum validnya data dan up to date



		Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan dan Perda No, 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	obyek pajak		
	6,05 % peningkatan PAD	RPJMD 2016 – 2021	Kapasitas untuk melakukan pendataan wajib pajak	-	Belum validnya data dan up to date
Kajian terhadap Renstra PD Provinsi	Belum memenuhi target Propinsi 13,48 % peningkatan PAD	13,48 % peningkatan PAD	Kapasitas untuk melakukan movev dan kesesuaian pelaporan data pajak		Kualitas kompetensi sumber daya manusia
Kajian terhadap Renstra Kementerian	Belum memenuhi target kementerian	64% Prosentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD	-	Koordinasi dengan PD terkait	-

### 3.1.2. Analisa Masalah

Metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada yaitu dengan analisa SWOT (strenghts, Weakness, Opportunities and Threats) hasil analisis digunakan untuk menetapkan strategi apa yang dipilih didalam menjalankan organisasi.

Analisis SWOT untuk Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

**Kekuatan** (Strenghts) yaitu situasi dan kondisi internal positif yang memungkinkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang berkiprah dalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen kekuatan yang dimiliki antara lain :

- a. Tugas pokok dan fungsi yang jelas dan didukung anggaran
- b. Adanya peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi.
- c. Tersedianya SDM aparatur yang tercukupi, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai
- d. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan;

**Kelemahan** (Weaknesses) yaitu situasi dan kondisi internal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi didalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen kelemahan yang dimungkinkan ada antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya;
- b. Kurangnya pemahaman regulasi peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi

- c. Kurang optimalnya kinerja SDM aparatur, penggunaan sarana dan prasarana
- d. Kurangnya koordinasi anatar PD;

**Peluang** (Opportunities) yaitu situasi dan kondisi eksternal positif yang mempermudah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Didalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen peluang yang dapat dijumpai antara lain :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- b. Mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Mewujudkan pelayanan publik yang prima, pelayanan pajak secara online;
- d. Regulasi peraturan perundang-undangan.

**Ancaman** (Threats)

- a. Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai target
- b. Pemungutan pajak tidak optimal, petugas pajak menyalahgunakan kewenangannya;
- c. Wajib pajak tidak memahami peraturan perundang-undangan tentang pajak dan prosedur pelayanan pajak.
- d. Kurang tertibnya administrasi , transparansi dan akuntabilitas

Berdasarkan analisi lingkungan internal dan eksternal diatas, dengan menggunakan analisis SWOT, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Strategi Strengths Opportunity, yaitu mendayagunakan kekuatan, memanfaatkan peluang'
- b. Strategi Strengths Threats, yaitu mendayagunakan kekuatan, hindari ancaman.
- c. Strategi Weakness Opportunity, yaitu mengatasi kelemahan , memanfaatkan peluang.
- d. Strategi Weakness Threats, yaitu meminimalkan kelemahan menghindari ancaman.

Sebagai hasil interaksi analisi lingkungan internal dan eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut dituangkan ke dalam tabel dibawah ini :

**Tabel III.2**  
**Pemetaan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal**

ALE ALI	KEKUATAN (Strenghts/S)	KELEMAHAN (Weakness/W)
	1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas 2. Adanya Peraturan perundang – undangan tentang pajak	1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya; 2. Kurangnya pemahaman

	<p>daerah dan retribusi daerah</p> <p>3. Tersedianya SDM Aparatur, sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>4. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan</p>	<p>regulasi peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>3. Kurang optimalnya kinerja SDM aparatur, dan kurangnya sarana dan prasarana</p> <p>4. Kurangnya koordinasi anatar PD;</p>
PELUANG (O)	S+O	W+O
<p>1. Peningkatan Kinerja ASN</p> <p>2. Mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>3. Mewujudkan pelayanan prima ;</p> <p>4. Pelayanan Pajak secara online</p>	<p>1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas dan melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (S1,2-O2)</p> <p>2. Mendaya gunakan SDM, sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan prima dan pelayanan pajak secara online (S3-O3,4)</p> <p>3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja ASN (S1,4-O1)</p>	<p>1. Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar PD untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (W1,4-O2)</p> <p>2. Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dan dukungan sarana prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima dan pelayanan pajak secara online (W3-O3,4)</p>
ANCAMAN (T)	S+T	W+T
<p>1. Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai target</p> <p>2. Pemungutan pajak tidak optimal, petugas pajak menyalahgunakan kewenangannya;</p> <p>3. Data Wajib pajak kurang valid</p> <p>4. Kurang tertibnya administrasi, , transparansi dan akuntabilitas</p>	<p>1. Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang validnya data wajib pajak dan mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas (S1-T3,4)</p> <p>2. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan dukungan komitmen dari pimpinan untuk tercapainya target PAD dan mengoptimalkan pajak daerah dari penyalahgunaan wewenang petugas pajak (S2,4-T1,2)</p>	<p>1. Meminimalkan Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak , menghindari penyalahgunaan kewenangan petugas pajak dan PAD sesuai target (W1-T1,2);</p> <p>2. Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur, dan kurangnya sarana dan prasarana serta meningkatkan koordinasi anatar PD untuk memutakhirkan data wajib pajak. (w3,4-T3)</p>

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Bapenda Kabupaten Pemalang, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-6 yaitu : **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah”**.

Peran serta Bapenda dalam misi dimaksud adalah mewujudkan tata kelola keuangan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN, prima dalam melayani masyarakat, serta meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Pemalang terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut diatas adalah **“membantu Bupati dalam**

**melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah**“ dan fungsi Bapenda Kabupaten Pemalang adalah :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel : III.3**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi : 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
		Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan perlu dilakukan review	Belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah dan SOP mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja	Peningkatan pelayanan sesuai dengan Sistem dan prosedur
		Belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM	Keterbatasan SDM yang berkompeten	Diadakannya diklat dan penambahan SDM
		Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dlm memperhatikan, membayar dan melaporkan	Keterbatasan sumber daya manusia	
		Kurangnya sosialisasi dan informasi ttg pembayaran pajak daerah	Keterbatasan anggaran	

		Belum validnya data wajib pajak	masih memakai data dari KPP Pratama pelimpahan PBB-P2 tahun 2013	
		Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;		
		Masih lemahnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pendapatan daerah	Keterbatasan anggaran dan SDM	
		Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;	Keterbatasan anggaran	
		Terbatasnya anggaran yang tersedia;	Alokasi anggaran yang tidak mencukupi	
		Belum optimalnya sistem informasi daerah	Keterbatasan SDM di bidang informatika	

### 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

#### 3.3.1. Telaah Renstra Kementerian

Pada tingkat kementerian lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah adalah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD), Visi dari DJKD adalah : **“Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”**, dengan misinya adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **Tujuan :**

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif

**Sasaran :**

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

**Arah Kebijakan :**

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitas pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian intensif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMN dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitas, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitas di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perancangan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

**Strategi :**

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Permasalahan pelayanan PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota berdasarkan sasaran Renstra K/L disajikan dalam Tabel III.4 dibawah:

**Tabel: III.4**  
**Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/Kabupaten/Kota**  
**Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor**  
**Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah	Beberapa regulasi yang terkait dengan Pengelolaan pendapatan perlu dilakukan review	Belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah dan SOP mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja	Peningkatan pelayanan sesuai dengan Sistim dan prosedur

### 3.3.2. Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah

Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah kementerian lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan pendapatan, keuangan asset daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPPAD), Visi dari DPPAD Tahun 2013-2018 adalah : “Menjadi Dinas yang Transparan dan Akuntabel didukung oleh Pelayanan Prima dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna”, dengan misinya adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM;
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi;
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur;
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Mengintesisifkan pemungutan pajak daerah;
7. Mengintesisifkan dan mengekstensifkan pumungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan asset daerah;
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan asset



daerah.

**Tujuan :**

1. Mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi, professional dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan;
2. Mewujudkan tatakelola administrasi yang cepat, mudah, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan tata kerja sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik;
4. Mewujudkan pelayanan yang baik, aparatur yang disiplin, beretos kerja tinggi, inovatif dan berprestasi;
5. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan;
6. Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan;
7. Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai dengan target yang ditetapkan;
8. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan asset daerah yang efektif dan efisien;
9. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan asset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas kerja aparatur.
2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
3. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat.
4. Meningkatnya kepuasan publik.
5. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisien kerja.
6. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja dan meningkatkan nyakualitas pelayanan publik.
7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik.
8. Meningkatnya pendap atasli daerah dari unsur pajak daerah.
9. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain.
10. Meningkatnya pemanfaatan asset daerah.
11. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status asset daerah.
12. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan asset.

**Arah Kebijakan :**

1. Peningkatan kualitas kompetensi, professional dan produktifitas sumber daya manusia;
2. Pengembangan implementasi teknologi informasi;

3. Peningkatan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur;
4. Peningkatan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Intensifikasi pemungutan pajak daerah;
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
8. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan asset daerah;
9. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan asset daerah.

**Strategi :**

1. Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjenjangan, kursus, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi.
2. Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan komitmen seluruh level manajemen dalam pelaksanaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).
4. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan tugas secara konsisten dan memberikan *rewards and punishment*.
5. Merehabilitasi dan atau membangun gedung baru, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai.
6. Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pungutan pajak daerah pendapatan lain-lain secara konsisten.
7. Mengadministrasikan asset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara professional berbasis teknologi.
8. Memasarkan asset daerah yang lebih efektif dan efisien.

Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya disajikan dalam Tabel III.5.

**Tabel : III.5**

**Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan	Kurangnya SDM yang berkompeten	Target PAD

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011–2031, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan :

- (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;
- (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan;
- (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial;
- (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal.

Telaah RTRW Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Bapenda Kabupaten Pemalang ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat salah satu tugas Bapenda adalah pengelolaan pendapatan asli daerah, dalam hal ini adalah mendorong pemanfaatan aset daerah secara optimal sebagai kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Mengingat pemanfaatan aset berkaitan dengan penggunaan/ peruntukan lahan/ tanah oleh pemohon/ pengguna, maka RTRW juga berimplikasi terhadap pengelolaan aset daerah.

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan dalam Tabel :III.6 dibawah :

Tabel : III.6

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	-	Pemanfaatan asset oleh pihak yang lain yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan	Kebutuhan pemakai/ pemohon	Peraturan/ regulasi ten tang RTRW dan penge lolaan

### 3.4.2 Telaah KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pematang ini, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pematang, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM di bidang pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana optimalisasi pendapatan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan pendapatan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. Bahwa pelayanan Bapenda

Kabupaten Pemalang tidak ada keterkaitan secara langsung dengan analisis KLHS.

**Tabel : III.7**

**Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-

**3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis Bapenda Kabupaten Pemalang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuanyang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan endapatan perlu dilakukan review seiring dengan perkembangan kelembagaan serta terbitnya produk hukum tingkat atasnya. Selain itu belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah, dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaanpajak daerah dan retribusi daerah, karena institusi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan baru terbentuk pada awal tahun 2017, dimana didalamnya banyak pegawai yang baru masuk, sehingga belum menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai tentang regulasi tersebut;
3. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak

- daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
5. Belum validnya data wajib pajak, karena masih memakai data dari KPP Pratama pelimpahan PBB-P2 tahun 2013;
  6. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
  7. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pendapatan daerah;
  8. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
  9. Terbatasnya anggaran yang tersedia;
  10. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah.

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran tau implemantasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu satu sampai lima tahun. Dengan tujuan ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Bapenda Kabupaten Pematang Jaya dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Adapun visi Kabupaten Pematang Jaya yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) yaitu **“Pematang Jaya Hebat Yang Berdaulat, Berjatidi, Mandiri dan Sejahtera”**

Sedangkan Misi Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Adapun misi Kabupaten Pematang Jaya yang menjadi rujukan untuk Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya yaitu :

**Misi 6**

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah”.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pemalang yang dijadikan rujukan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 yaitu :

**Tujuan :**

Mewujudkan tertib adminitrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan transparan seta efesiensi dalam pemanfaatan APBD

**Indikator Tujuan :**

Rasio peningkatan PAD.

**Sasaran:**

Terwujudnya tertib adminitrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan transparan seta efesiensi dalam pemanfaatan APBD

Secara rinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 disajikan pada tabel IV.1 berikut ini :

**Tabel IV.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten**  
**Pemalang**

<b>Tujuan</b>		<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	
1	Mewujudkan tertib adminitrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan transparan seta efesiensi dalam pemanfa atan APBD	Rasio peningkatan PAD	1	Mewujudkan tertib adminitrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan transparan seta efesiensi dalam pemanfa atan APBD

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian sasaran dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 2 indikator. Indikator pada masing-masing sasaran adalah pada tabel dibawah ini :



**Tabel. IV.2**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten emalang**

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
1	Terwujudnya tertib adminitrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan transparan seta efesiensi dalam pemanfa atan APBD	1	Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target
		2	Prosentase pertumbuhan PAD

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai serta menetapkan target kinerja, tujuan dan sasaran yang terukur. Gambaran tujuan dan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja jangka menengah pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel : IV.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan transparan seta efisiensi dalam pemanfa atan APBD	Terwujudnya tertib adminitrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan transparan seta efisiensi dalam pemanfa atan APBD	Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target	5,00%	6,50%	6,90%	7,25%	7,50%	7,80%
			Prosentase Pertumbuhan PAD	6,01%	6,05%	6,10%	6,15%	6,17%	6,20%

#### 4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptualistis dan komprehensif tentang langkah-langkah /upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam penentuan strategi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Pengembangan kapasitas, kualitas dan etos kerja Aparatur;
2. Pengembangan dan penerapan regulasi secara konsisten dan menyeluruh;
3. Penerapan SPP, maklumat pelayanan dan pengukuran kepuasan masyarakat diprioritaskan pada PD yang melakukan pelayanan publik.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah disajikan diatas maka strategi Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas dan melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah ;
2. Mendaya gunakan SDM, sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan prima dan pelayanan pajak secara online ;
3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja ASN ;
3. Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar PD untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah ;
4. Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dan dukungan sarana prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima dan pelayanan pajak secara online ;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang validnya data wajib pajak dan mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan dukungan komitmen dari pimpinan untuk tercapainya target PAD dan mengoptimalkan pajak daerah dari penyalahgunaan wewenang petugas pajak ;
7. Meminimalkan Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak , menghindari penyalahgunaan kewenangan petugas pajak dan PAD sesuai target ;
8. Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur, dan kurangnya sarana dan prasarana serta meningkatkan koordinasi antar PD untuk memutakhirkan data wajib pajak.

Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan- ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan.

Dari gambaran telaah Renstra Kementrian dan telaah Renstra Provinsi, maka dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta strategi, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tugas dan fungsi dari Bapenda terutama yang terkait dengan Keuangan Daerah. Beberapa sasaran yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra Bapenda Kabupaten Pemalang, yaitu: “Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD”.

Adapun arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran serta strategi yang telah ditetapkan adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak daerah;
2. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah berdasarkan potensi yang ada;
3. Optimalisasi pemanfaatan asset berupa tanah sawah eks bondo desa yang berubah statusnya mejadi kelurahan, agar dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah.
4. Pengembangan basis data dan potensi pajak daerah agar valid dan up to date;

Berdasarkan asumsi asumsi strategis sebagaimana tersebut diatas, maka program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Badan pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.4**  
**Program dan Indikator**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang**  
**Tahun 2016-2021**

No	Program	Indikator	Target Per Tahun	Bidang	
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Persentase wajib pajak tertagih /persentase data pajak daerah yang ditetapkan (PBB)	70 %	Bidang Pendataan dan Penetapan
		2	Persentase realisasi PAD terhadap target	100 %	Bidang Perencanaan Pendapatan
		3	Rasio pajak daerah terhadap PAD	17,5 %	Bidang Penagihan dan Keberatan

**Tabel IV.5**  
**Program, Kegiatan dan Indikator**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang**  
**Tahun 2016-2021**

No	Program	Kegiatan	Indikator	Sub Bagian/ Sub Bidang	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yg dikelola	Subbag Umum dan Kepegawaian
		2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang berijin	Subbag Umum dan Kepegawaian
		4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah keg pelap bulanan administrasi keuangan yang	Subbag Umum dan Kepegawaian

				dilaksanakan	
		5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	Subbag Umum dan Kepegawaian
		6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia	Subbag Umum dan Kepegawaian
		7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Subbag Umum dan Kepegawaian
		8	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Subbag Umum dan Kepegawaian
		9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Subbag Umum dan Kepegawaian
		10	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang dibeli	Subbag Umum dan Kepegawaian
		11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	Subbag Umum dan Kepegawaian
		12	Penyediaan makanan & minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Subbag Umum dan Kepegawaian
		13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke lu	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang diikuti	Subbag Umum dan Kepegawaian
		14	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia	Subbag Umum dan Kepegawaian
		15	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan pendapatan	Jumlah kegiatan peningkatan pendapatan pajak daerah yang dilaksanakan	Subbag Bigram dan Keuangan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16	Pembangunan gedung kator	Jumlah pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan	Subbag Umum dan Kepegawaian
		17	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibeli	Subbag Umum dan Kepegawaian
		18	Pengadaan	Jumlah pengadaan	Subbag

			perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Umum dan Kepegawaian
		19	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang dibeli	Subbag Umum dan Kepegawaian
		20	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	Subbag Umum & Kepegawaian
		21	Pengadaan kom puter dan per lengkapannya	Jumlah pengadaan kom puter dan per lengkapannya yang dibeli	Subbag Umum dan Kepegawaian
		22	Pengadaan alat-alat elektronika	Jumlah alat-alat elektronik yang dibeli	Subbag Umum dan Kepegawaian
		23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian
		24	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian
		25	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian
		26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian
		27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian
		28	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian
		29	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian
		30	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Jumlah pemeliharaan software dan sistem informasi yang dilaksanakan	Subbag Umum dan Kepegawaian
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31	Sosialisasi peraturan perundangundangan	Jumlah peserta diklat/sosialisasi/seminar /work shop	Subbag Umum dan Kepegawaian
		32	Pelatihan Tekhnis pelaksanaan	Jumlah peserta pelatihan teknis pelaksanaan	Subbag Umum dan Kepegawaian

			tupoksi SKPD	tupoksi	Kepegawaian
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	33	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	Subbag Bigram dan Keuangan
		34	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD yg disusun	Subbag Bigram dan Keuangan
		35	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	Subbag Bigram dan Keuangan
5	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	36	Penyusunan data base perencanaan	Jumlah data base yang tersusun	Subbag Bigram dan Keuangan
		37	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun	Subbag Bigram dan Keuangan
6	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	38	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah perbud sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	Sub Bidang Perencanaan
		39	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang tersusun	Sub Bidang Perencanaan
		40	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan informasi pemungutan pajak daerah yang tersusun	Sub Bidang Perencanaan
		41	Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah pengawasan dan kepatuhan membayar pajak daerah yang dilaksanakan	Sub Bidang Penagihan
		42	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jml keg monev pendapatan daerah, pengembangan sistem reward stakeholder PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan yg dilaksanakan	Sub Bidang Pelaporan
		43	Intensifikasi dan	Jumlah sewa tanah ex bondo	Sub Bidang



		ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	desa yg desanya berubah status menjadi kelurahan yang terlaksana	Penagihan
44		Peningkatan efektifitas pengelola keuangan daerah	Jml sinergitas pengelolaan pendapatan antar OPD & se luruh stake holder yg dilaksanakan	Sub Bidang Pelaporan
45		Penyusunan pelaporan semesteran aset / barang PD / barang PD	Jumlah laporan semesteran aset / barang PD yang tersusun	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
46		Penyusunan perhitungan potensi pajak dan target pendapatan	Jumlah perhitungan potensi pajak dan target pendapatan yang tersusun	Sub Bidang Perencanaan
47		Penyusunan laporan pendapatan daerah	Jml laporan pendapatan daerah & perhitungan UP retri busi bagi SKPD pengelola pendapatan yang tersusun	Sub Bidang Pelaporan
48		Penyusunan Pemutakhiran data pajak daerah	Jml keg pemutahitran data pajak daerah yang dilaksanakan	Sub Bidang Pendataan
49		Pendataan Wajib Pajak	Jml pendapatan wajib pajak yang dilaksanakan	Sub Bidang Pendataan
50		Penyusunan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah	Jml rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah yang dilaksanakan	Sub Bidang Pendataan
51		Penelitian/pemeriksaan Obyek Pajak dan Wajib Pajak	Jumlah Penelitian/pemeriksaan Obyek Pajak &Wajib Pajak yang dilaksanakan	Sub Bidang Penetapan
52		Penilaian, penetapan dan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	Sub Bidang Penetapan

		53	Penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/ SPPT/ DHKP)	Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang distribusikan	Sub Bidang Penetapan
		54	Penyusunan daftar tunggakan pajak	Jumlah daftar tunggakan pajak yang tersusun	Sub Bidang Penagihan
		55	Penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan & Surat Teguran	Jml penerbitan & penyampaian Surat Tagihan & Surat Teguran yg dilaksanakan	Sub Bidang Penagihan
		56	Penghapusan piutang Pajak Daerah	Jml penghapusan piutang Pajak Daerah yg tersusun	Sub Bidang Keberatan
		57	Penyelesaian pengaduan & pelayanan pengajuan keberatan	Jml pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan yg terselesaikan	Sub Bidang Keberatan
		58	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak /pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yg tidak benar	Jumlah pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak/ pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yang terselesaikan	Sub Bidang Keberatan
		59	Pengadaan Papan Hibauan Informasi Pajak Daerah	Jumlah papan hibauan informasi pajak daerah kepada publik yg tersedia	Sub Bidang Pelaporan
		60	Legalisasi karcis/ benda berharga	Jml kegiatan porporasi karcis/ benda berharga yang diselesaikan	Sub Bagian Bigram dan Keuangan

## BAB V

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKIATIF**

#### **5.1. Rencana Program**

Rencana program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 terdiri dari 6 (enam) program, dan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. **Program ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD.**

#### **5.2. Kegiatan**

Kegiatan merupakan aktifitas sebagai penjabaran dari program yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun . kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdemensi 5 (lima) tahun Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang rencana melaksanakan 60 kegiatan.

Sesuai dengan tugas poko dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2016-2021 telah menetapkan program dan kegiatan yaitu :

##### **1. Program pelayanan administrasi perkantoran**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
- 7) Penyediaan alat tulis kantor
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 12) Penyediaan makanan dan minuman
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah
- 14) Penyediaan jasa keamanan
- 15) Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan pendapatan

## **2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- 16) Pembangunan gedung kantor
- 17) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 18) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 19) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 20) Pengadaan mebeleur
- 21) Pengadaan komputer dan perlengkapannya
- 22) Pengadaan alat-alat elektronika
- 23) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 24) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- 25) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 26) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 27) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 28) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- 29) Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
- 30) Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi

## **3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- 31) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 32) Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD

## **4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

dengan kegiatan sebagai berikut :

- 33) Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)

- 34) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- 35) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

**5. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- 36) Penyusunan data base perencanaan
- 37) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

**6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- 38) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- 39) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi
- 40) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- 41) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- 42) Monitoring, evaluasi pelaporan dan pengelolaan pendapatan daerah
- 43) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan
- 44) Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah
- 45) Penyusunan pelaporan semesteran aset/barang PD
- 46) Penyusunan perhitungan potensi pajak dan target pendapatan
- 47) Penyusunan laporan pendapatan daerah
- 48) Penyusunan pemutahiran data pajak daerah
- 49) Pendataan wajib pajak
- 50) Penyusunan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah
- 51) Penelitian/pemeriksaan obyek pajak dan wajib pajak
- 52) Penelitian, penetapan dan pencetakan surat ketetapan pajak daerah

- 53) Penerbitan dan pendidtribusi Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD/SPPT/DHKP)
- 54) Penyusunan daftar tunggakan pajak
- 55) Penerbitan dan penyampaian surat tagihan dan surat teguran
- 56) Penghapusan piutang pajak daerah
- 57) Penyelesaian pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan
- 58) Penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak /pembetulan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
- 59) Pengadaan papan himbuan informasi pajak daerah
- 60) Legalisasi karcis/benda berharga

### **5.3 Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada tabel : V.1

Tabel : V.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang  
Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					5.703.750		7.941.300		7.754.000		7.789.097		8.339.000		8.339.000			
			4	4			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian																		
Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yg akuntabel dan transparan serta efisiensi dalam pemanfaatan APBD	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yg akuntabel dan transparan serta efisiensi dalam pemanfaatan APBD	Rasio realisasi PAD terhadap pendP/otensi/terget	4	4	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran an setiap bulan	Bulan			12	1.292.390	12	1.088.300	12	1.311.500	12	1.291.767	12	1.427.000	12	1.427.000		
		Persentase pertumbuhan PAD	4	4	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	Surat			7000	20.500	7000	15.000	7.000	19.000	7.000	18.850	7.000	25.000	7.000	25.000	Bapenda	Kab. Pml

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Keuaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Peninggungan Jawa B	Lokasi		
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4	4	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Bulan			12	129.900	12	126.000	12	180.000	12	184.200	12	200.000	12	200.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang berijin	Unit			46	10.000	46	15.000	46	30.000	60	18.974	60	25.000	60	25.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan pelaporan bulanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	Bulan			12	49.500	12	125.000	12	140.000	12	90.000	12	100.000	12	100.000	Bapenda	Kab. PML
			4	4	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	Bulan			12	23.000	12	25.000	12	25.000	12	20.000	12	25.000	12	25.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia	Bulan			12	6.000	12	1.500	12	5.000	12	7.500	12	10.000	12	10.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Pkt			1	40.000	1	50.000	1	40.000	1	39.998	1	45.000	1	45.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	1	11	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Pkt			1	100.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	25.000	1	25.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Bulan			12	10.000	12	10.000	12	7.000	12	7.000	12	15.000	12	15.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	1	13	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang dibeli	Buah			152	20.000	5	20.000	5	10.000	10	29.500	5	10.000	5	10.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	Pkt			1	8.890	1	11.500	1	15.000	1	14.100	1	15.000	1	15.000	Bapenda	Kab. Pml



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Peninggalan Jawa	Lokasi		
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4	4	1	17	Penyediaan makanan & minuman	Jumlah makanan & minuman yang dibeli	Jenis			4	95.000	4	105.000	4	85.000	4	80.000	4	100.000	4	100.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke lu	Jumlah rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah yang diikuti	Bulan			12	150.000	12	173.500	12	200.000	12	200.000	12	220.000	12	220.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah jasa Keamanan Kantor yang tersedia	Bulan			12	9.600	12	10.800	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12	12.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	1	25	Penyediaan jasa admkeuangan pengelolaan pendapatan	Jumlah kegiatan peningkatan pendapatan pajak daerah yang dilaksanakan	Bulan			12	620.000	12	380.000	12	523.500	12	574.645	12	600.000	12	600.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bln	Bulan			12	748.440	12	1.114.230	12	549.500	12	1.033.025	12	1.200.000	12	1.200.000		
			4	4	2	3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan	unit			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jm kendaraan dinas/ operasional yg dibutuhkan	Unit			3	0	3	101.000	3	0	4	729.800	4	100.000	4	100.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jml pengadaan perlengkapan kantor	Unit			57	12.000	50	19.000	4	0	5	0	5	20.000	5	20.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jml peralatan gedung kantor yg dibeli	Unit			1	0	1	39.250	2	34.500	2	28.500	2	30.000	2	30.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	unit			10	42.000	60	55.130	10	30.000	2	6.000	2	20.000	2	20.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli	unit			10	427.250	6	529.800	4	7.000	9	48.875	4	50.000	4	50.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	12	Pengadaan alat-alat elektronika	Jumlah alat-alat elektronika yang dibeli	Unit			5	0	3	0	2	0	2	0	3	86.000	3	86.000	Bapenda	Kab. Pml

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4	4	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit			1	34.190	16	38.050	10	30.000	2	20.900	2	30.000	2	30.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yg dipelihara	unit			1	30.000	1	56.000	1	30.000	1	20.900	1	25.000	1	25.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	unit			45	85.000	45	35.000	45	100.000	60	53.000	45	60.000	45	60.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung/ kantor yang dipelihara	Bulan			12	20.000	12	15.000	12	135.000	12	16.050	12	20.000	12	20.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Bulan			12	3.000	12	35.000	12	0	12	0	12	10.000	12	10.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yg dipelihara	Bulan			12	15.000	12	1.000	12	0	12	0	12	10.000	12	10.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer & perlengkapannya yg dipelihara	Bulan			12	60.000	12	45.000	12	65.000	40	50.000	12	60.000	12	60.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	2	45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Jumlah pemeliharaan software dan sistim informasi yg dilaksanakan	Bulan			12	20.000	12	145.000	12	118.000	1	60.000	12	65.000	12	65.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya SDM aparatur yg memiliki kompetensi	%			<b>3,63</b>	<b>149.000</b>	<b>3,63</b>	<b>282.800</b>	<b>3,63</b>	<b>270.000</b>	<b>3,63</b>	<b>535.000</b>	<b>3,63</b>	<b>510.000</b>	<b>3,63</b>	<b>510.000</b>		
			4	4	5	2	Sosialisasi peraturan perundangundangan	Jml peserta diklat/ sosialisasi/ seminar/ workshop	Org			75	130.000	75	133.000	75	160.000	75	460.000	75	460.000	75	460.000	Bapenda	Kab. Pml

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Peninggalan Jawa	Lokasi			
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			4	4	5	4	Pelatihan Tekhnik pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah peserta Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi	Org			50	19.000	50	149.000	50	110.000	75	75.000	50	75.000	50	75.000	Bapenda	Kab. Pml	
			4	4	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	Bulan			12	45.000	12	62.500	12	80.000	12	72.100	12	95.000	12	95.000			
			4	4	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen			15	0	15	22.500	15	35.000	5	40.000	15	50.000	15	50.000	Bapenda	Kab. Pml	
			4	4	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	Buku			15	20.000	15	15.000	15	15.000	0	0	15	10.000	15	10.000	Bapenda	Kab. Pml	
			4	4	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Buku			20	25.000	20	25.000	20	30.000	15	32.100	20	35.000	20	35.000	Bapenda	Kab. Pml	
			4	4	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terlaksananya peningkatan dan perencanaan penganggaran yang tersedia	Bulan			12	95.000	12	145.000	12	155.000	12	123.225	12	120.000	12	120.000			
			4	4	9	1	Penyusunan data base perencanaan	Jumlah data base yang tersusun	Kegiatan					2	15.000	2	30.000	2	19.850	2	20.000	2	20.000			
			4	4	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun	Dokumen			7	95.000	6	130.000	6	125.000	6	103.375	6	100.000	6	100.000	Bapenda	Kab. Pml	
			4	4	15		Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah						3.373.920		5.248.470		5.388.000		4.733.979		4.962.000		4.962.000			
Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yg akuntabel dan trans	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yg akuntabel dan trans	Rasio realisasi PAD terhadap potensi/						a. Rasio realisasi PAD terhadap potensi/ Target.	%			6,50		6,90		7,25		7,50		7,80		7,80				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penerimaan Anggaran	Lokasi			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
paran serta efesiensi dalam pemanfaatan APBD	paran serta efesiensi dalam pemanfaatan APBD	target																							
		Persentase pertumbuhan PAD																							
			4	4	15	4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Perbup sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	Dokumen			1	70.000	1	50.000	1	75.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	15	5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang tersusun	Dokumen			3	100.000	1	25.000	1	43.000	1	23.000	1	25.000	1	25.000		
			4	4	15	13	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem Informasi pemungutan pajak daerah yang tersusun	Sistem			2	225.000	1	510.000	1	322.500	1	314.750	1	325.000	1	325.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	15	19	Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah pengawasan dan pemantauan kepatuhan membayar pajak daerah yang dilaksanakan	Bulan			12	92.000	12	100.000	12	120.000	12	101.610	12	120.000	12	120.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	15	29	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah kegiatan monitoring, Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengembangan sistem Reward (Penghargaan) bagi stakeholder PAD, dan	Kegiatan			4	457.000	4	1.333.000	4	1.241.250	4	1.300.000	4	1.300.000	4	1.300.000	Bapenda	Kab. Pml

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Peninggungan Jawa b	Lokasi			
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							Peningkatan kualitas pengelolaan yang dilaksanakan																			
			4	4	15	33	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	Ha			318	77.000	318	80.000	318	80.000	295	81.250	318	85.000	318	85.000	Bapenda	Kab. Pml		
			4	4	15	36	Peningkatan efektifitas pengelola keuangan daerah	Kali			12	0	12	440.000	12	350.000	4	364.000	12	375.000	12	375.000	Bapenda	Kab. Pml		
			4	4	15	37	Penyusunan pelaporan semesteran aset/ barang PD	Dokumen			2	24.500	2	25.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	Bapenda	Kab. Pml		
			4	4	15	38	Penyusunan perhitungan potensi pajak dan target pendapatan	Dokumen			2	105.000	2	135.000	2	136.000	2	99.400	2	100.000	2	100.000	Bapenda	Kab. Pml		
			4	4	15	39	Penyusunan laporan pendapatan daerah	Kali			12	43.000	12	35.000	12	51.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	Bapenda	Kab. Pml		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4	4	15	40	Penyusunan Pemutakhiran data pajak daerah	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pajak daerah yang dilaksanakan	Kegiatan			1	712.170	1	1.307.095	1	1.241.000	1	973.070	1	975.000	1	975.000	Bapenda	46 unit
			4	4	15	41	Pendataan Wajib Pajak	Jumlah pendataan wajib pajak yang dilaksanakan	Kali			12	60.000	12	224.000	12	251.000	12	162.258	12	200.000	12	200.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	15	42	Penyusunan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah	Jumlah rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah yang dilaksanakan	Kali			12	25.000	12	40.000	12	95.500	12	12.239	12	15.000	12	15.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	15	43	Penelitian/pemeriksaan Obyek Pajak dan Wajib Pajak	Jumlah penelitian / pemeriksaan Obyek Pajak dan wajib pajak yang dilaksanakan	Kali			12	40.000	12	55.000	12	65.000	12	70.000	12	80.000	12	80.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	15	44	Penilaian, penetapan dan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	Dokumen			670.649	300.000	670.649	426.000	670.649	500.000	670.649	528.500	670.649	550.000	670.649	570.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	15	45	Penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/ SPPT/ DHKP)	Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang distribusikan	Dokumen			670.649	728.250	670.649	735.000	670.649	125.000	670.649	135.000	670.649	150.000	670.649	150.000	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	15	46	Penyusunan daftar tunggakan pajak	Jumlah daftar tunggakan pajak daerah yang tersusun	Dokumen			12	30.000	12	30.000	12	23.000	12	29.277	12	30.000	12	30.000	Bapenda	Kab. Pml

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Peninggalan Jawa	Lokasi			
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			4	4	15	47	Penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan dan Surat Teguran	Jumlah Penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan dan Surat Teguran	Bulan			12	252.000	12	252.000	12	270.000	12	252.105	12	260.000	12	260.000	Bapenda	Kab. Pml	
			4	4	15	48	Penghapusan piutang Pajak Daerah	Jumlah penghapusan piutang pajak daerah yang tersusun	Dokumen			1	300.000	1	62.375	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	15	49	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan	Jumlah pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan yang terselesaikan	Bulan			12	32.000	12	40.000	12	50.000	120	81.270	120	90.000	120	90.000	Bapenda	Kab. Pml	
			4	4	15	50	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan Restitusi	Jumlah pengaduan dan pelayanan permohonan Restitusi	Bulan			12	0	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	Bapenda	Kab. Pml
			4	4	15	51	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak/ pembetulan/ pembatalan pajak yang tidak benar	Jumlah pengaduan dan permohonan pengurangan/ pembetulan / pembatalan ketetapan pajak daerah yang terselesaikan	Bulan			12	30.000	12	40.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	Bapenda	Kab. Pml	
			4	4	15	52	Pengadaan Papan Hibauan Informasi Pajak Daerah	Jumlah papan hibauan informasi pajak daerah kepada publik yang tersedia	Buah			250	113.000	250	150.000	250	148.000	242	130.000	250	150.000	250	150.000	Bapenda	Kab. Pml	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penerimaan	Lokasi		
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4	4	15	53	Legalisasi karcis/ benda berharga	Jumlah kegiatan porporasi karcis/ benda berharga yang diselesaikan	Kegiatan			1	15.000	12	30.000	12	40.000	12	35.000	12	40.000	12	40.000	Bapenda	Kab. Pml



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok Sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang secara langsung menunjukkan kinerja 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis, mengingat rencana kinerja merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel : 6. di bawah ini :

**Tabel : VI.1.**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Target Kinerja Periode selanjutnya					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	
1	Rasio Realisasi PAD terhadap potensi/target	1,12%	5,00%	6,50%	6,90%	7,25%	7,50%	7,80%
2	Peningkatan (Pertumbuhan) PAD	17,39 %	6,01%	6,05%	6,10%	6,15%	6,17%	6,20%

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016–2021 para pengelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan pedoman/panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang di masa-masa mendatang.

Ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang arah kebijakan dan rencana program serta kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang. Oleh karena sifatnya masih indikatif maka setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan/ anggaran yang tersedia.

Pemalang, 10 Juni 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BEJO SUWARNO, S.IP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611125 198607 1 001

